

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMERINTAH DAERAH
DI SUMATERA UTARA MEMILIH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANDI
NIM : 126232158



PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMERINTAH DAERAH
DI SUMATERA UTARA MEMILIH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2024**



DIAJUKAN OLEH

NAMA : ANDI

NIM : 126232158

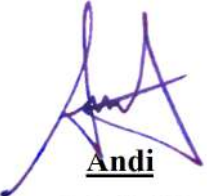
**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMERINTAH DAERAH
DI SUMATERA UTARA MEMILIH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2024**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:


Andi
126232158

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Ivan Kanel S.E., M.Ak., M.M., Ak. BKP, CPA, CA, CPMA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) Tahun 2024. SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyeragaman penggunaan SIPD ditinjau dari teori institusional, khususnya isomorfosis koersif. Meskipun SIPD memiliki banyak kelemahan, pemda tetap menggunakannya sebagai aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya di wilayah provinsi Sumatera Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyeragaman penggunaan SIPD merupakan isomorfisme koersif berupa kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tekanan dari pemegang kekuasaan, dan kebutuhan untuk mengakses sumber daya.

Kata Kunci: sistem informasi, SIPD, teori institusional, isomorfosis, koersif.

This research aims to explore the factors that influence regional governments using the local government information system (LGIS)/(SIPD) for Year 2024. SIPD is the management of local development information, local financial information, and other local government information that is interconnected to be used in implementing local development. The uniformity of SIPD use is viewed from institutional theory, especially coercive isomorphism. Even though SIPD has many weaknesses, local governments still use it as an application for local government financial management, especially in the North Sumatra province. The conclusion of this research shows that uniformity in the use of SIPD is a coercive isomorphism in the form of compliance with government regulations, pressure from power holders, and the need to access resources.

Keywords: information systems, SIPD, institutional theory, isomorphism, coercive.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam yang berjasa mencerdaskan umat manusia, sehingga karya akhir dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara Memilih Menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun 2024” dapat diselesaikan. Karya akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan kelulusan pada Program Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tarumanagara (UNTAR). Karya akhir ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, CA., CPA selaku Kepala Ketua Program Studi PPAk.
2. Bapak Ivan Kanel S.E., M.Ak., M.M., Ak. BKP, CPA, CA, CPMA selaku dosen pembimbing akademis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun tugas akhir.
3. Ibu dan Bapak Dosen dan Civitas Untar yang telah meluangkan waktu dan tenaga berbagi ilmu selama pelaksanaan studi.
4. Kedua orang tua, Ayahanda Abdullah P. Din dan Ibunda Nur Asni, serta saudara saya, Bang Anto dan Zulham yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan sepenuh hati kepada penulis.
5. Istri penulis, drg. Mita Suci Afrilla dan anak-anak kami, ananda Aliyya, Afiyya, serta Amira yang telah memberikan cinta dan doa kepada penulis, serta menjadi penyemangat dan pendukung setia.

Semoga Tuhan YME membalas segala kebaikan kita semua. Penulis menyadari bahwa karya akhir ini tidak sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk perbaikan.

Jakarta, 30 Desember 2024

Andi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah	3
1.3 Tujuan, Manfaat, dan Motivasi Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Landasan Teori: Teori Institusional Isomorfisme Koersif.....	5
2.2 Kajian Penelitian	7
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Pendekatan Penelitian	13
3.2 Subjek Penelitian.....	13
3.3 Instrumen Penelitian.....	15
3.4 Jenis dan Sumber Data	16
3.5 Teknik Pengumpulan Data	16
BAB IV HASIL DAN BAHASAN.....	17
4.1 Hasil Penelitian	17
4.2 Bahasan	21
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	27
5.1 Simpulan.....	27
5.2 Saran.....	28
REFERENSI.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi Partisipan Penelitian.....	17
Tabel 4.2 Klasifikasi Respon Berdasarkan Tema dan Subtema.....	18
Tabel 4.3 Tabulasi Subtema pada Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah	19
Tabel 4.4 Tabulasi Subtema pada Tekanan dari Pemegang Kekuasaan.....	20
Tabel 4.5 Tabulasi Subtema pada Kebutuhan untuk Mengakses Sumber Daya.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	32
Lampiran 2	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas tata kelola di sektor publik menjadi keharusan agar pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi (Almquist dkk., 2013). Dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara, asas akuntabilitas dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya pemerintah yang bersih (*good governance*) (Republik Indonesia, 2003). Akuntabilitas juga merupakan asas umum penyelenggaraan negara yang penting untuk segera dipenuhi agar dapat menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Republik Indonesia, 1999). Akuntabilitas diwujudkan dengan informasi pemerintahan daerah yang mudah untuk diakses dengan data yang handal, untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan (Republik Indonesia, 2019). Hal tersebut penting untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, terbuka/transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2019a).

Dalam mewujudkan informasi pemerintah yang aksesibilitas (*accessibility*) tinggi dan handal (*reliable*), maka penting bagi pemda untuk menyelenggarakan sistem informasi. Sistem Informasi merupakan sebuah rangkaian prosedur kerja yang sistematis dan resmi serta organisasional yang didesain untuk menghimpun, memproses, menyimpan, dan menyalurkan informasi (Piccoli dan Pigni, 2019).

Merespon hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun regulasi terkait informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Republik Indonesia, 2019b). SIPD didesain untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu. Hal tersebut juga dilakukan untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur tentang pengelolaan SIPD.

SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk

dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun, sejatinya pemda-pemda keberadaan regulasi-regulasi yang disebutkan di atas, diberikan kebebasan untuk menggunakan aplikasi lain yang dapat membantu pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau aplikasi lain yang dibangun secara mandiri oleh masing-masing pemda.

Berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 367 Pemda yang telah menggunakan seluruh modul SIPD RI dan masih tersisa 179 Pemda yang belum menggunakan modul penatausahaan dan akuntansi pelaporan pada aplikasi SIPD RI (Lampiran 1). Selain itu, pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara meraih peringkat pertama dalam pembinaan pengelolaan informasi pembangunan daerah pada SIPD (sumutprov.go.id, 2024). Tetapi, di sisi lain terdapat banyak keluhan atas penggunaan SIPD (bengkulu.tribunnews.com, 2024). Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakseragaman operasional pengelolaan keuangan daerah, meskipun dalam regulasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah, SIPD telah ditetapkan bahwa penggunaan SIPD bersifat *wajib/mandatory*.

Dalam penelitian ini, pemilihan fenomena yang juga dibatasi lingkup geografis yaitu Provinsi Sumatera, berkaitan pengetahuan dan pengalaman kerja peneliti selama 8 tahun menjadi pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada wilayah tersebut, menjadi penting dalam penelitian ini untuk mendapatkan perspektif emik. Perspektif emik merujuk pada pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pandangan, pemahaman, dan pengalaman dari sudut pandang orang-orang yang sedang diteliti, yaitu dari orang dalam budaya atau kelompok tertentu (Creswell, 2014). Meskipun pendekatan ini sering digunakan dalam etnografi, namun tetap relevan dalam penelitian kualitatif lain untuk mengetahui lebih dalam makna yang diberikan oleh individu bahkan kelompok, dalam konteks tertentu.

Penelitian ini akan berfokus pada pemda yang menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan pendekatan studi kasus, di

wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini diharapkan dapat mengeksplorasi masalah secara spesifik sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan pemda di Sumatera Utara memilih menggunakan SIPD tahun 2024

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Penggunaan sistem informasi dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh regulasi, yaitu memenuhi prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, terbuka/transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai hal tersebut perlu diselenggarakan sistem informasi yang handal. Terdapat beberapa sistem atau aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diantaranya SIPD. SIPD tentu memiliki banyak keunggulan, namun tidak terlepas dari kekurangan yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kondisi tersebut, pemda-pemda tetap menggunakan SIPD sebagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi entitas pemda pada akhirnya tetap memilih SIPD dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Agar memiliki manfaat yang mutakhir, penelitian ini fokus pada tahun atau periode penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada tahun 2024.

1.3 Tujuan, Manfaat, dan Motivasi Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian dilakukan ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemda di Sumatera Utara memilih menggunakan SIPD Tahun 2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut.

a. Kontribusi Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis, yaitu sebagai sumber referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya terkait tema sistem informasi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

b. Kontribusi Praktis

Kontribusi teknis yang dapat diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) sebagai bahan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menganalisis kekurangan dari SIPD, untuk selanjutnya melakukan perbaikan atau pengembangan aplikasi/sistem.;
- 2) sebagai bahan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyusun strategi pemeriksaan yang secara khusus ditujukan untuk menguji sistem pengendalian intern (SPI) dalam SIPD;

Motivasi penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemda di Sumatera Utara memilih menggunakan SIPD Tahun 2024. Studi atas fenomena tersebut dengan pendekatan teori institusional isomorfosis koersif, sejauh penelusuran yang dilakukan, belum dilaksanakan oleh para peneliti. Penelitian yang ada hanya berfokus pada yang teknis sistem pengelolaan keuangan.

Padahal perkembangan saat ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi menjadi lebih kuat daripada sekedar pertimbangan teknis dalam memilih sebuah aplikasi atau sistem dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, faktor-faktor yang menjadikan pemda tetap memilih SIPD sebagai aplikasi atau sistem dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi penting untuk dieksplorasi.

REFERENSI

- Almquist, R., Grossi, G., Van Helden, G. J., dan Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. Critical perspectives on Accounting.
- Aditya, A., & Putri, S. N. (2021). Penggunaan informasi kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja kementerian/lembaga: Perspektif isomorfisme institusional. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 125-140. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/download/70469/36235>
- Belitung Research Team. (2018). Analisis sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Dana Desa tahun 2015 di Kabupaten Belitung. *Jurnal Keuangan dan Pemerintahan*, 6(3), 89-103. <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/download/59349/28996>
- Benbasat, I., dan Zmud, R. W. (2003). The identity crisis within the IS discipline: Defining and communicating the discipline's core properties. *MIS Quarterly*.
- bengkulu.tribunnews.com. (2024). Aplikasi SIPD-RI Lemot, Serapan Anggaran Pemkab Rejang Lebong Bengkulu Terganggu.
- Chan, J. L. (2003). Government Accounting: An Assessment of Theory, Purpose, and Standards. *Public Administration Review*.
- Creswell, J.W., dan Creswell, J.D. (2014). Research Design (4th ed.)—Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.
- Davis, G. B. (1974). Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development. New York: McGraw-Hill.
- DeLone, W. H., dan McLean, E. R. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information Systems Research*.
- DiMaggio, P. J., dan Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*.
- Guest, G., Bunce, A., dan Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field methods*.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. Sage.
- Hidayah, N. (2020). Kinerja sektor publik pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan teori isomorfisma institusional**. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 9*(2), 125-140. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam/article/view/135>
- Kuzel, A. J. (1992). Sampling in qualitative inquiry. *Doing qualitative research*.

- Leavitt, H. J., dan Whisler, T. L. (1958). Management in the 1980s. Harvard Business Review.
- Meyer, J. W., dan Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American journal of sociology*.
- Nasution, M. I., dan Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Nuryanto, M., & Afiah, N. N. (2013). Implementasi anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas sektor publik: Studi pada Pemerintah DIY. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4 (1), 27-37. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7103>
- Piccoli, G., dan Pigni, F. (2019). Information systems for managers: with cases. Prospect Press, Inc..
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2019a). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2019b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Schedler, K., Jager, L., dan von der Emde, A. (2004). Implementing financial management systems in developing countries: Challenges and insights from the field. *Public Administration and Development*
- Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests (3rd ed.). Sage Publications.
- sumutprov.go.id. (2024). Sumut Raih Peringkat Pertama Pembinaan Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah. Medan.